AKIBAT HUKUM PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 111/Pdt.P/2011/PN.Ska**Oleh****Kezia Liring Pasek Trila¹, Andrie Irawan², Erna Wati³****^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta****Email: ¹Keziali31@gmail.com, ²andrie.ir@gmail.com, ³erna.wati288@gmail.com**

Article History:*Received: 20-07-2023**Revised: 06-08-2023**Accepted: 26-08-2023***Keywords:***Pertimbangan Hakim,
Penetapan Pengadilan,
Perkawinan, Beda Agama.*

Abstract: *Dewasa ini terjadi beberapa kasus perkawinan beda agama/ kepercayaan yang dilaksanakan hanya dengan mengajukan permohonan perkawinan di Pengadilan Negeri setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2011/PN.Ska. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif, dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum normative digunakan untuk melihat pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan beda agama serta kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: akibat hukum terhadap penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska maka tidak ada persoalan karena secara hukum boleh melakukan perkawinan beda agama. Termasuk nanti dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak mereka sudah di atur dalam Undang-Undang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk pelanggaran dan kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Selain itu, dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan

kehidupan dalam masyarakat negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut juga berlaku terhadap hal perkawinan.

Perkawinan di Indonesia pada awalnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, melihat dinamika yang terjadi di masyarakat bahwa hukum perkawinan yang diatur dalam bab IV buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tidak layak berlaku lagi bagi masyarakat Indonesia, maka dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dengan berlakunya undang-undang tersebut maka tidak menutup kemungkinan berlakunya hukum agama/kepercayaan yang dianut.

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak dan perkawinan merupakan kebutuhan dari tiap-tiap individu. Keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya, serta hak tentang kebebasan untuk melakukan sesuatu hal, membawa masalah baru dalam hukum di Indonesia. Salah satu halnya adalah dua orang yang ingin melakukan perkawinan akan tetapi agama yang mereka anut berlainan. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan dan hukum agama tidak memperbolehkan pelaksanaan perkawinan yang dilandaskan pada perbedaan agama/kepercayaan.

Perkawinan beda agama merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas dan tuntas. Meskipun di Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Sebut saja perkawinan beda agama yang belum di atur secara tegas dalam undang-undang tersebut. Padahal dalam realitas sosial kemasyarakatan, Indonesia yang banyak agama, artinya negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama negara, melainkan ada 6 (enam) agama yang telah diakui yaitu: agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Berikut penulis akan membahas berbagai pandangan dari keenam agama yang ada di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan perkawinan beda agama.¹

Dewasa ini terjadi beberapa kasus perkawinan beda agama/ kepercayaan yang dilaksanakan hanya dengan mengajukan permohonan perkawinan di Pengadilan Negeri setempat. Dalam usaha memperkuat prinsip tersebut maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-

¹ A. Syamsul Bahri dan Adama, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2; No. 1, Juni 2020, hlm. 77.

badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya yaitu Pengadilan Negeri Republik Indonesia.

Salah satu contoh permohonan perkawinan beda agama yaitu seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Dimana Pengadilan Negeri Surakarta telah mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska yang berisi pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama kepada Pemohon I (laki-laki) yang beragama Kristen dan Pemohon II (perempuan) yang beragama Islam, dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, dengan dasar pertimbangan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kewenangan pengadilan dalam menetapkan permasalahan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut apa akibat hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2011/PN.Ska?

METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif meliputi inventarisasi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penegakan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik, untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.² Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum normative digunakan untuk melihat akibat hukum penetapan perkawinan beda agama serta kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Metode Pendekatan Penelitian.

Sehubungan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Sumber Data.

Data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai akibat dan kedudukan hukum anak dalam perkawinan siri. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut adalah:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.³ Sehingga disini bahan hukum primer yang

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 14.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers,

dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2011/PN.Ska

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat para sarjana hukum.⁴ Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks yang membahas mengenai perkawinan dan pertimbangan hakim.

c. Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, website dan lain-lain.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena perkawinan beda agama di beberapa kalangan di Indonesia seperti sudah menjadi hal yang biasa, ada beberapa kalangan muslim yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama bagi seseorang laki-laki muslim dengan ahli kitab masih diperbolehkan dengan alasan bahwa di dalam Alquran hal tersebut diperbolehkan seperti dalam surat Almaidah ayat 5 yang pada intinya diperbolehkan untuk mengawini para perempuan ahli kitab sebelum kamu. Namun ada beberapa ahli yang masih meragukan dalam artian bukan meragukan ayat tersebut tetapi lebih meragukan apakah pada saat ini, ahli kitab yang diidentikkan oleh sebagian ahli kepada kaum Yahudi dan Nasrani masih terjaga seperti dulu.⁶

Perkawinan beda agama sebagai suatu perbuatan hukum, tentunya akan memunculkan adanya akibat hukum. Dalam penelitian ini, pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2011/PN.Ska merupakan suatu peristiwa hukum yang memunculkan suatu akibat hukum. Salah satunya adalah berupa bagaimana proses pencatatan perkawinan beda agama. Hal tersebut dikarenakan pencatatan perkawinan merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mewujudkan ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan.

Pencatatan perkawinan selanjutnya akan menghasilkan suatu akta pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dibuktikan keabsahannya apabila telah memenuhi ketentuan hukum yang dimiliki oleh masing-masing agama calon pengantin. Dalam hal ini, kata masing-masing mengindikasikan bahwa pasangan calon pengantin tersebut memeluk satu agama yang sama atau bisa memeluk agama yang berbeda.

Jakarta, 2010, hal. 13.

⁴ *Op Cit.*

⁵ *Ibid*

⁶ Andrie Irawan, *Kritikan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Academy of Education Jurnal, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 1, Januari 2014, hlm. 26.

Peristiwa perkawinan beda agama dapat terjadi apabila calon pengantin mendapatkan persetujuan untuk melakukan perkawinan beda agama tersebut dari pengadilan melalui penetapan pengadilan, salah satunya penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2011/PN.Ska. Penetapan tersebut mengacu pada permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pasangan untuk menjadi acuan dalam memberikan permohonan atas pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Dalam memberikan suatu penetapan pengadilan atas peristiwa hukum perkawinan beda agama, hakim tentu memiliki berbagai pertimbangan. Salah satunya pertimbangan tersebut adalah pemohon yang menyatakan sanggup untuk bertanggung jawab secara penuh atas anak yang dilahirkan melalui perkawinan beda agama tersebut. Selain itu, setiap anak yang dilahirkan tentu memiliki hak yang perlu untuk dijamin dan dilindungi oleh hukum yang ada.

Secara garis besar, pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pertimbangan sosiologis, yuridis, dan administratif kenegaraan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hakim menetapkan suatu putusan pengadilan bahwa perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta mendapatkan perizinan untuk diberlangsungkan dan dianggap sah secara hukum. Sehingga, perkawinan beda agama tersebut dapat diajukan untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Pengesahan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan tersebut tentu memicu adanya akibat hukum, khususnya pada status dan kedudukan anak yang dilahirkan, status perkawinan, hingga pembagian harta sebagaimana yang telah diatur. Berikut ini merupakan penjelasan lebih detail terkait akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama tersebut:

- a. Dapat melangsungkan perkawinan beda Agama.

Dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2011/PN.Ska maka implikasi hukumnya adalah bahwa Para Pemohon diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

- b. Dilakukan pencatatan perkawinan beda agama oleh Kantor Pencatatan Sipil.

Dengan dikeluarkannya penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2011/PN.Ska maka kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diperintahkan untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

- c. Terhadap Status dan Kedudukan Anak.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2011/PN.Ska, Menurut penulis, Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak

dan orang tua seperti pada Pasal 45 s.d Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak yang berbunyi (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Didalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang perlindungan anak diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan perundnag-undnagan yang berlaku.

Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa maupun perkawinan beda agama adalah sama dan harus sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa maupun perkawinan beda agama adalah sama dan harus sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang berbeda agama, dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan diantara mereka. Dimana dalam suatu rumah tangga terdapat 2 (dua) orang yang tunduk kepada 2 (dua) hukum agama. seperti halnya nanti pada pola pengasuhan anak, dimana sang anak nanti akan memeluk agama mana yang akan dipilihnya. Hal demikian dapat diminimalisirkan dengan adanya perundingan atau pembicaraan diantara suami dan istrinya nanti.

d. Hak dan Kewajiban antara pihak yang melangsungkan Perkawinan Beda Agama.

Perkawinan yang dinyatakan sah secara hukum menimbulkan hubungan lebih lanjut antara suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hubungan antara suami dan istri tersebut selanjutnya memicu adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur terkait hak dan kewajiban dari suami dan istri melalui. Suami dan istri sudah seharusnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, sehingga hak dan kewajiban yang mereka miliki setara untuk satu sama lain.⁸

Fakta yuridis yang ditelaah melalui amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan yang telah sesuai dengan persyaratan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan menyatakan bahwa perkawinan beda agama tersebut telah memenuhi syarat materiil karenan berkenaan dengan usia perkawinan, keduanya telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan sehingga

⁷ Lysa Setiabudi, *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016, Hlm. 102

⁸ A. Syamsul Bahri Dan Adama, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 1, hlm. 84

perkawinan beda agama tersebut dapat diberlangsungkan.

Selain itu, dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan dalam melangsungkan perkawinan. Atau diperjelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh dua insan tidak terhalang oleh perbedaan agama yang dianut oleh keduanya. Oleh karena itu, terkait apakah suatu perkawinan beda agama diizinkan atau tidak, Pengadilan Negeri lah yang memiliki wewenang untuk memutuskan.

Penulis berpendapat bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ketika perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka hubungan suami dan istri yang tercipta juga termasuk sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Apabila dalam implementasi hak dan kewajiban menimbulkan ketidakadilan, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai yang tertuang di dalam.

Namun, bagi seorang suami yang memeluk agama Islam, ia memiliki beberapa hak yang tidak dimiliki oleh pihak istri, antara lain:

- 1) Hak melakukan poligami;
- 2) Hak menjatuhkan talak;
- 3) Hak tidak saling mewarisi peninggalan harta waris;
- 4) Hak melakukan rujuk dengan istri tanpa melalui akad nikah baru. Hak-hak tersebut dapat dipergunakan oleh suami yang beragama Islam meskipun pihak istri tidak memeluk agama Islam.⁹

Hak dan kewajiban tersebut masing-masing diatur dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa hak status istri sama dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat, sehingga masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Mengenai pembagian kerja antara suami dan istri, dikatakan bahwa "Suami adalah kepala keluarga, dan suami istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, dan saling mendukung baik dalam Jasmani dan rohanini", suami juga berkewajiban untuk melindungi istrinya dan menafkahi istrinya dan istri harus dalam mengurus rumah tangga.¹⁰

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan juga diatur dalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut: suami istri harus saling setia, tolong menolong, dan bantu membantu Suami dan istri juga bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Kepala keluarga adalah suami, maka istri harus patuh dan tunduk pada suaminya.

KESIMPULAN

Akibat hukum terhadap penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska maka tidak ada persoalan karena secara hukum boleh melakukan perkawinan beda agama. Termasuk nanti dalam hubungan antara

⁹ Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 56.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 65.

suami istri dan anak-anak mereka sudah di atur dalam Undang-Undang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syamsul Bahri Dan Adama , *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 1.
- [2] Andrie Irawan, *Kritikan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Academy of Education Jurnal, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 1, Januari 2014.
- [3] Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020.
- [4] Lysa Setiabudi, *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016
- [5] Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska
- [6] Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.